

## PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN No. 36 TAHUN 2008 DAN PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT*

EDDY JONI

STIE Trisakti  
eddyjoni@yahoo.com

**Abstract :** *This study aimed to examine the practice of earnings management before and after the change in corporate income tax rates with Tax Law No. 36 of 2008 on income tax. Earnings management in this study using two approaches, which are discretionary accruals and deferred Tax. Further research will analyze the factors that affect the practice of earnings management proxy variables with the tax incentives of tax planning and tax incentives to non proxy earnings pressure, debt levels, audit quality, growth, and profitability. This study uses a total of 51 companies registered profits in the Indonesia Stock Exchange during the period of observation years from 2007 to 2010. Total observations in this study are 204. The results prove that (1) The Company does not make earnings management in response to changes in corporate income tax rates in Indonesia, (2) earnings pressure influences discretionary accruals, (3) earnings pressure, debt levels and profitability influence deferred tax.*

**Keywords :** Changes in corporate income tax rates, earnings management, tax incentives, non-tax incentives.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menguji praktek manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan badan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu akrual diskresioner dan Pajak tangguhan. Penelitian lebih lanjut akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba, faktor tersebut adalah insentif pajak berupa perencanaan pajak dan non-tax incentives berupa tekanan laba, tingkat hutang, kualitas audit, pertumbuhan dan profitabilitas. Penelitian ini menggunakan 51 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan tahun dari 2007 sampai 2010. Jumlah pengamatan dalam penelitian ini adalah 204. Hasilnya membuktikan bahwa (1) Perusahaan tidak membuat manajemen laba dalam menanggapi perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, (2) tekanan laba berpengaruh terhadap akrual diskresioner, (3) tekanan laba, tingkat hutang dan profitabilitas berpengaruh terhadap pajak tangguhan.

**Kata kunci :** *Changes in corporate income tax rates, manajemen laba, insentif pajak, non-tax incentives.*

## PENDAHULUAN

Konflik antara manajemen dengan pemerintah biasanya timbul dalam hal perpajakan. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk memungut pajak setinggi mungkin (merupakan penghasilan yang diperoleh pemerintah), sedangkan manajemen sebagai pihak yang melakukan pembayaran sudah tentu ingin membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut dirasakan terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi data laba perusahaan.

Pada tahun 2008, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008.

Melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan badan maka jumlah pajak yang aliran dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan (28 % dari penghasilan kena pajak pada tahun fiskal 2009 dan 25 % dari penghasilan kena pajak mulai tahun fiskal 2010), tetapi dengan penurunan tersebut apakah akan membawa dampak bagi perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba? Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan keuntungan yang optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus.

Jika perusahaan memandang momen tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan laba/mempercepat pengakuan biaya pada tahun sebelumnya sehingga laba tahun 2009 dan 2010 menjadi tinggi. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Studi terdahulu membuktikan bahwa pajak dapat menjadi salah satu insentif manajer melakukan manajemen laba (Frankel dan Trezervant 1994).

*Income taxation* dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earning management*. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earning management*. Penelitian di Amerika banyak meneliti tentang dampak pemilihan metode penilaian persediaan LIFO dan FIFO dan pengaruhnya pada beban pajak penghasilan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Douch and Pincus (1988); Lindahl (1989); Dhaliwal, et.al (1994), Cloyd et.al. (1996) yang hasilnya menunjukkan bahwa banyak perusahaan memilih metode LIFO untuk menghemat pajak penghasilan. Kebijakan pemilihan metode penilaian persediaan LIFO tidak memungkinkan di Indonesia karena penilaian persediaan yang diperkenankan dalam peraturan perundangan perpajakan di Indonesia hanya metode FIFO dan rata-rata.

Penelitian lain yang dimotivasi pajak dilakukan oleh Guenther (1994) yang meneliti adanya *earning management* dalam merespon *Tax Reform Act* (TRA) 1986 di *United States*. Penelitian ini untuk menguji apakah ada perilaku *earning management* yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan TRA di US, untuk meminimumkan beban pajak penghasilan. Guenther memfokuskan pada indikasi adanya total akrual laba akuntansi dengan membandingkan sebelum dan sesudah diberlakukannya TRA. Hasilnya gagal membuktikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual laba perusahaan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan. Sedangkan penelitian Frankel dan Trezervant (1994) memfokuskan pada satu keputusan pembelian persediaan pada akhir tahun, dengan pembelian akhir tahun dan dengan metode LIFO, akan memberikan insentif laba lebih rendah sebelum berlakunya TRA sehingga ada penghematan pajak. Selanjutnya Yin dan Cheng (2004) melakukan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994). Yin dan Cheng (2004) menguji apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak badan di Amerika Serikat. Yin dan Cheng (2004) membagi sampel penelitiannya ke dalam dua kelompok, yaitu: perusahaan yang memperoleh laba (*profit firms*) dan perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firms*). Mereka menguji pengaruh dari insentif pajak dan insentif non pajak terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak. Yin dan Cheng (2004) menggunakan pendekatan *discretionary current accrual* dalam mendeteksi manajemen laba dan menemukan bukti empiris, yaitu: (1) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) berhubungan signifikan dengan insentif pajak dan insentif non-pajak; dan (2) Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) hanya berhubungan signifikan dengan insentif non-pajak saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajer mungkin melakukan manajemen laba ketika

perusahaan mengalami laba sehingga berupaya meminimalkan beban pajak.

Selanjutnya penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba berkaitan dengan perubahan undang-undang pajak dilakukan Setiawati (2001), oleh Hidayati dan Zulaikha (2003), Wulandari *et al.* (2004) dan Subagyo dan Oktavia (2010). Setiawati (2001) yang menguji apakah ada perilaku *earning management* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam merespon perubahan Undang-undang pajak penghasilan tahun 1994 yang mulai berlaku 1995. Dalam mendeteksi adanya *earning management*, Setiawati menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan terbuka yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 1994 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan.

Hidayati dan Zulaikha (2003) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Dalam penelitian ini Hidayati dan Zulaikha tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Wulandari *et al.* (2004); Subagyo dan Oktavia (2010) bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba merespon perubahan UU PPh dengan *discretionary accrual*. Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk melakukan penghematan pajak menjelang UU perpajakan 2000. Selanjutnya Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penelitian praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan pada periode tahun 2008 dan 2009 atas respon perubahan undang-undang tahun 2008, hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk merespon perubahan undang-undang.

Beberapa penelitian manajemen laba telah menggunakan pendekatan lain yaitu pajak tangguhan (*deferred tax*) seperti yang dilakukan Holland dan Jackson (2002), Zhang (2002), Phillips *et al.* (2003), dan Yulianti (2004). Holland dan Jackson (2002) dalam penelitiannya membuktikan bahwa terdapat perbedaan sistematis antara jumlah pajak tangguhan yang aktual dan yang ditetapkan (*deferred tax provisions*) dalam *Statement of Standard Accounting Practice 15* (SSAP 15) tentang *Accounting for Deferred Tax*. Perbedaan itu terjadi karena manajer diijinkan untuk membuat kewenangan dalam menentukan batasan jumlah pajak tangguhan. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara *deferred tax provisions* dengan praktek manajemen laba di tahun 1991 dan 1992 pada 58 perusahaan yang menjadi sample penelitian.

Phillips *et al.* (2003) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba. Dalam penelitian tersebut, beban pajak tangguhan diperlakukan sebagai salah satu pengukuran *accruals* bersama-sama dengan pengukuran akrual menurut *Modified Jones Model* (Dechow, *et al.*, 1995) dan pengukuran akrual menurut *Forward-Looking Jones Model* (Dechow *et al.* 2003). Penelitian terkait pajak tangguhan di Indonesia dilakukan Yulianti (2004) mengenai kemampuan beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba menunjukkan hasil yang positif dan signifikan pada hubungan antara beban pajak tangguhan dengan adanya kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari terjadinya kerugian. Penelitian tersebut merupakan replikasi atas penelitian Phillips *et al.* (2003).

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya maka penelitian ini melakukan pengujian kembali konsistensi hasil penelitian dalam mengindikasikan praktik manajemen laba sebelum dan sesudah perubahan UU PPh tahun 2008 pada perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini juga akan menguji apa-

kah manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dimotivasi oleh insentif pajak atau insentif non pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah 1) penelitian ini menguji pengamatan dari tahun 2007 sampai tahun 2010; 2) Penelitian ini juga tidak memasukkan perusahaan rugi sebagai sampel karena perusahaan yang mengalami kerugian (*loss firm*) tidak perlu melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilannya sebab perusahaan yang mengalami kerugian tidak haliran membayar pajak. Selain itu, berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan yang mengalami kerugian boleh mengkompensasi kerugiannya maksimal dalam kurun waktu lima tahun; 3) Selain itu penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam mendeteksi praktik manajemen laba yaitu metode akrual (*discretionary accrual*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Salah satu insentif yang dapat mendorong manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang haliran dibayar oleh perusahaan (Scott, 2003; Hidayati dan Zulaikah, 2003; Setiawati dan Na'im, 2000). Di Amerika Serikat terdapat studi empiris tentang perilaku yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan (yang dikenal dengan *TRA/Tax Reform Act*). Studi empiris ini mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Guenther, 1994). *Tax Reform Act* (TRA) di Amerika Serikat dipublikasikan pada bulan September 1986, dan berlaku efektif 1 Juli 1987 sehingga fleksibilitas kebijakan akuntansi berperan sebagai suatu peluang yang tersedia untuk menunda pelaporan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi TRA terhadap perusahaan di United State (US). Seperti banyak penelitian manajemen yang lain, Guenther memfokuskan pada total akrual. Dalam penelitiannya Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Siti Munfiah (2003) dalam mendeteksi adanya *earning management* menggunakan pendekatan *discretionary accrual* model Jones. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang menguji adanya indikasi manajemen laba saat sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor perubahan tarif pajak penghasilan badan berdampak pada perilaku manajemen laba perusahaan. Hal ini ditandai dengan nilai hasil pengujian manajemen laba yang membuktikan bahwa nilai *discretionary accrual* setelah perubahan tarif PPh Badan lebih tinggi daripada nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif PPh Badan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk menunda penghasilannya pada tahun 2000, dimana tarif PPh Badannya masih tinggi, dan kemudian mengakuinya sebagai penghasilan pada tahun 2001, dimana tarif PPh Badannya lebih kecil, sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji penurunan lapisan Penghasilan Kena Pajak dan perubahan tarif pada Wajib Pajak di Indonesia tahun 2008, yang diberlakukan efektif tahun 2009, memberikan peluang kepada perusahaan untuk menikmati penghematan pajak, sehingga menyebabkan manajer untuk melakukan rekayasa akrual laba atau beban. Manajemen Laba dalam penelitian ini diwakili dengan *discretionary accrual* dan pajak tangguhan (*deferred tax*).

Penelitian yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004) menggunakan proksi perencanaan pajak sebagai ukuran dari insentif pajak. Meskipun banyak penelitian di luar negeri yang meneliti mengenai perilaku manajemen laba dikaitkan dengan perubahan tarif pajak (Scholes

et al, 1992; Guenther, 1994; Maydew, 1997), tetapi hanya penelitian Yin dan Cheng (2004) saja yang memasukkan unsur insentif pajak dalam penelitiannya. Yin dan Cheng (2004) berpendapat bahwa upaya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan dibatasi oleh perencanaan pajaknya.

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh insentif atau faktor non pajak. Guenther (1994) menemukan bukti empiris bahwa insentif non pajak (ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial) berpengaruh signifikan terhadap *discretionary current accrual*. Menurut Yin dan Cheng (2004), perbedaan dalam insentif non pajak di antara perusahaan yang memperoleh laba dengan perusahaan yang mengalami kerugian menentukan bahwa manajemen laba sebagai respon atas perubahan tarif pajak, berbeda di antara kedua jenis perusahaan tersebut. Insentif non pajak dalam penelitian Yin dan Cheng (2004) diukur dengan *earnings pressure*, tingkat hutang, *earnings bath*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Holland dan Ramsay (2003) menemukan, ada metodologi lain yang dapat digunakan dalam penelitian manajemen laba yaitu dengan mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan insentif manajemen laba. Faktor-faktor tersebut antara lain, ukuran perusahaan, kualitas auditor, pertumbuhan penjualan, aliran kas operasi, penerapan *corporate governance*, dan penggunaan hutang.

Di Indonesia penelitian serupa dilakukan oleh Yulianti (2004); Subagyo dan Oktavia (2010). Faktor pemicu manajemen laba yang digunakan dalam penelitiannya adalah, profitabilitas, hutang, besarnya perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan penerapan *corporate governance* di perusahaan. Sedangkan Subagyo dan Oktavia (2010) menggunakan pendekatan yang sama dengan Yin dan Cheng (2004).

Pada penelitian ini untuk variabel insentif pajak digunakan proksi perencanaan pajak yaitu tarif pajak dikali laba komersil sebelum pajak dikurangi beban pajak kini seperti yang dilakukan oleh Yin dan Cheng (2004); Subagyo dan

Oktavia (2010). Penelitian ini tidak memasukan beberapa ukuran dari insentif non pajak yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010) antara lain:

- a. Ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan *Earnings bath* karena pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*.
- b. Persentase saham disetor yang diperdagangkan di BEI, karena pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010), variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap *earnings management*. Selain itu terdapat penurunan batas porsi saham publik untuk mendapatkan insentif pajak, dari 40% menjadi 35%, menurut pengamat pasar modal Edwin Sinaga dalam Harian Seputar Indonesia tanggal 3 Oktober 2011 bahwa pengurangan batasan untuk mendapatkan insentif pajak, belum bisa dipastikan pengaruhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka insentif non pajak yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Earnings pressure*

Insentif pajak mengimplikasikan bahwa perusahaan akan memilih untuk menurunkan laba sebagai respon atas penurunan tarif pajak. Untuk perusahaan yang labanya tidak mencapai target, penurunan laba yang dilakukan untuk tujuan pajak dapat dikurangi oleh *earnings pressure* guna meningkatkan laba akuntansi.

b. Tingkat Hutang

Dalam konteks penurunan tarif pajak, keputusan untuk melakukan manajemen laba sangat erat kaitannya dengan tingkat hutang perusahaan. Ukuran ini tetap dimasukkan walaupun dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) tidak berpengaruh signifikan karena perusahaan akan melakukan manajemen laba secara agresif untuk mencegah pelanggaran terhadap kontrak hutang (Watts dan Zimmerman, 1986).

c. Kualitas *Auditor*

Variabel ini merupakan variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukkan karena ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan akan berhubungan dengan keandalan dan kualitas hasil auditnya. Auditor merupakan pihak independen yang dapat mengurangi fleksibilitas manajemen melakukan manajemen laba. Semakin besar ukuran KAP akan semakin baik kualitas audit perusahaan. Auditor yang termasuk didalam lima besar (*Big Five*) diyakini memiliki pengalaman dan kualitas audit yang lebih baik bila di banding auditor di luar lima besar.

d. Pertumbuhan (*Growth*)

Variabel ini merupakan variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukkan karena menurut Mc.Nichols (2000) menyatakan bahwa besarnya akrual diskresioner terkait dengan pertumbuhan perusahaan, karena variabel pertumbuhan haliran dimasukkan ke dalam model yang menggunakan akrual diskresioner. Ukuran pertumbuhan disini adalah pertumbuhan penjualan perusahaan antar periode. Pertumbuhan penjualan mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengelola laba. Perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan merasa tidak perlu mempengaruhi laba agar menjadi positif atau meningkatkan labanya melalui manajemen laba.

e. Profitabilitas (ROA)

Variabel ini sebenarnya variabel yang berbeda dari Subagyo dan Oktavia (2010). Variabel ini dimasukan karena berdasarkan Hipotesa *bonus plan*; insentif manajer pada umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan. Karenanya profitabilitas dapat dijadikan indikasi dilakukannya manajemen laba dalam perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan pengukur ROA (*Return on Asset*).

Dari kerangka pemikiran di atas maka hipotesis umum pertama sampai kedelapan (H-1 sampai H-8) dapat dinyatakan sebagai berikut :

- H<sub>1a</sub> *Discretionary accrual* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi daripada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1b</sub> *Deferred Tax* selama dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada selama dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1c</sub> *Discretionary accrual* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1d</sub> *Deferred tax* satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan lebih rendah dari pada dua tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1e</sub> *Discretionary accrual* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1f</sub> *Deferred tax* satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun sebelum perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1g</sub> *Discretionary accrual* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>1h</sub> *Deferred tax* dua tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi dari pada satu tahun setelah perubahan undang-undang perpajakan.
- H<sub>2a</sub> Insentif pajak berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>2b</sub> Insentif pajak berpengaruh terhadap *deferred tax*
- H<sub>3a</sub> *Earnings pressure* berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>3b</sub> *Earnings pressure* berpengaruh terhadap *deferred tax*
- H<sub>4a</sub> Tingkat hutang berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>4b</sub> Tingkat hutang berpengaruh terhadap *deferred tax*

- H<sub>5a</sub> Kualitas Auditor berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>5b</sub> Kualitas Auditor berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*
- H<sub>6a</sub> *Growth* berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>6b</sub> *Growth* berpengaruh terhadap *deferred tax*
- H<sub>7a</sub> Profitabilitas berpengaruh terhadap *discretionary accrual*
- H<sub>7b</sub> Profitabilitas berpengaruh terhadap *deferred tax*

## METODA PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2010. Penelitian ini mengambil periode analisis dari tahun 2006 sampai 2010. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Berikut proses pemilihan sampel :

Tabel 1 Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Populasi Per 31 Desember 2010	420
Jenis industri jasa keuangan	(69)
<i>Listing</i> setelah tahun 2007	(42)
Laporan keuangan tidak lengkap dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010	(188)
Perusahaan mengalami kerugian pada periode 2006-2010	(70)
Jumlah sampel yang digunakan	51

Manajemen laba diukur dengan *discretionary accruals* dan *deferred tax expense*. *Discretionary accruals* (DA), perhitungan *discretionary accruals* menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995) yaitu sebagai berikut :

a. Menghitung total akrual

$$TACC_{it} = NI_{it} - CF_{it}$$

Yang terdiri dari :

$TACC_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$NI_{it}$  = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

$CF_{it}$  = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung tingkat akrual yang normal

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual*, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1})$$

Yang terdiri dari :

$TACC_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$TA_{it-1}$  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REV_{it}$  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$\Delta REC_{it}$  = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$PPE_{it}$  = Aset tetap perusahaan i pada tahun t

$\alpha_1, \beta_1, \beta_2$  = Estimasi *non-discretionary accrual*

$\varepsilon_{it}$  = *error term* perusahaan i pada tahun t

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara *non-discretionary accrual* dengan *discretionary accrual* yang dinyatakan pada persamaan berikut ini :

$$TACC_{it} = NDA_{it} + DA_{it}$$

Yang terdiri dari :

$TACC_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$NDA_{it}$  = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

$DA_{it}$  = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

c. Menghitung tingkat akrual yang tidak normal

$$DA_{it} = TACC_{it}/TA_{it-1} - [\alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1})]$$

Sedangkan *Deferred tax* (DT) diukur dengan :

$$DT_{it} = \frac{DT_{it}}{TA_{it-1}}$$

Dimana,

$DT_{it}$  = *Deferred tax benefit (expense)* perusahaan i pada tahun t

$TA_{it-1}$  = Total Asset pada akhir tahun t-1



Perencanaan pajak (TAXPLAN), Insentif pajak diprosikan dengan perencanaan pajak. Berdasarkan penelitian Yin dan Cheng (2004), perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$TAXPLAN = \frac{\sum_{2007}^{2008} (30\% * PTI - CTE) : 2}{TA_{2008}}$$

Yang terdiri dari :

TAXPLAN = Perencanaan pajak

PTI = *Pre-tax income*

CTE = *Current portion of total tax expense* (beban pajak kini).

Pada penelitian ini, digunakan tarif dengan persentase 30% karena sebelum diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, lapisan penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif ini adalah yang paling terbesar proporsinya. Selain itu, alasan digunakannya tarif efektif 30% ini karena perusahaan *go public* rata-rata memiliki laba di atas Rp100.000.000,-.

Model 1

$$DA_{it} = a + b_1 YD2009 * TAXPLAN_{it} + b_2 YD2010 * TAXPLAN_{it} + c_1 EXPRESS_{it} + c_2 DEBT_{it} + c_3 AUD_{it} + c_4 GROWTH_{it} + c_5 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model 2

$$DT_{it} = a + b_1 YD2009 * TAXPLAN_{it} + b_2 YD2010 * TAXPLAN_{it} + c_1 EXPRESS_{it} + c_2 DEBT_{it} + c_3 AUD_{it} + c_4 GROWTH_{it} + c_5 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

*DA* = *Discretionary accruals*

*DT* = *Deferred Tax*

*TAXPLAN* = Perencanaan pajak

*YD2009* = 1 untuk tahun 2009, dan 0 untuk tahun lainnya

*YD2010* = 1 untuk tahun 2010, dan 0 untuk tahun lainnya

*EXPRESS* = *Earnings pressure*

*DEBT* = Tingkat hutang

*AUD* = Kualitas Auditor

*GROWTH* = Pertumbuhan

*ROA* = Profitabilitas

*Earnings pressure* (EPRESS) dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu : (laba tahun berjalan-laba tahun lalu) / Total aset awal tahun. Tingkat hutang (DEBT) diukur dengan menggunakan rasio kewajiban jangka panjang terhadap total aset awal tahun. Kualitas auditor (AUD) perusahaan i pada tahun t bernilai 1 jika *Big Four* dan 0 jika lainnya. *Sale Growth* (GROWTH) diukur dengan :

$$SaleGrowth = \frac{Sale_t - Sale_{t-1}}{Sale_{t-1}}$$

Profitabilitas (ROA) diukur dengan :

$$ROA_{it} = \frac{NetIncome_{it}}{TotalAsset_{it}}$$

Hipotesis H<sub>1</sub> akan diuji dengan menggunakan Uji beda t-test. Sedangkan untuk menjawab Hipotesis H<sub>2</sub> sampai dengan H<sub>8</sub> akan digunakan regresi berganda dengan model sebagai berikut :

## HASIL PENELITIAN

Dari statistik deskriptif terlihat bahwa Rata-rata *discretionary accrual* adalah sebesar 0,00023491 dan *deferred tax* adalah sebesar 0,00018462. Untuk Statistik deskriptif variabel lain dari 204 observasi pada perusahaan manufaktur dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel 2**  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	204	-.271110	.654361	.00023491	.133919661
DT	204	-.034018	.017841	-.00018462	.006365621
YD2009TAXPLAN	204	-.010888	12.017506	.05894364	.841396943
YD2010TAXPLAN	204	-.010888	12.017506	.05894364	.841396943
EPRESS	204	-.260219	.520884	.02314009	.061360395
DEBT	204	.000000	.991578	.09351150	.137293228
AUDIT	204	0	1	.60	.490
GROWTH	204	-.476024	1.487150	.19532534	.285614515
ROA	204	.000808	.507910	.09057270	.088869737
Valid N (listwise)	204				

Uji normalitas data diperlukan untuk mengetahui alat analisis yang sehalirannya digunakan yaitu apakah analisa statistik parametrik atau non parametrik. Dari hasil uji normalitas data terlihat bahwa data berdistribusi normal untuk *discretionary accrual* (DA) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 karena Asymp. Sig (*Asymptotic significance 2-tailed*) lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk data *deferred tax* (DT) tahun 2008 sampai tahun 2010 berdistribusi normal namun data tahun 2007 tidak berdistribusi normal karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis  $H_{1a}$  sampai  $H_{1h}$  maka  $H_a$  tidak diterima bahwa Perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Setelah banyak kasus rekayasa laporan keuangan yang terjadi di Indonesia, Bapepam semakin meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan publik. Hal tersebutlah yang kemungkinan menyebabkan manajemen perusahaan publik lebih berhati-hati dalam melakukan rekayasa akrual untuk mempengaruhi laba perusahaan. Rekayasa yang mencolok akan mudah dideteksi dan mendapatkan pemeriksaan dari Bapepam sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terancam.

Penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) yang mengevaluasi pengaruh publikasi *Tax Reform Act* (TRA) terhadap perusahaan di Amerika. Selanjutnya penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2000) yang menyatakan tidak ada rekayasa laba akrual tahun 1994 dan 1995 dengan diundangkannya perubahan UU Perpajakan 1994 per 9 November 1994 dan juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munfiah (2003) yang dalam pengujiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan tahun 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayar. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang menemukan bukti empiris adanya praktis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang undang-undang perpajakan tahun 2000.

Dari hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjukkan bahwa secara parsial hanya satu variabel yaitu EPRESS yang berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Hasil yang signifikan memberikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan publik cenderung melakukan "big bath" (meninggikan beban restrukturisasi) dimana perusahaan akan melaporkan rugi diskresioner dan akrual pada periode yang sama ketika laba periode berjalannya negatif dan lebih rendah dari laba periode sebelumnya. Hasil ini konsisten dengan temuan Subagyo dan Oktavia (2010), Yin dan Cheng (2004).

Dari hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen laba secara bersama dapat menjelaskan variabel *deferred tax*. Dari beberapa variabel tersebut, secara parsial tiga variabel yaitu EPRESS, DEBT dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*. Hal ini membuktikan bahwa EPRESS, DEBT dan ROA dapat dijadikan indikasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba melalui *deferred tax*.

## PENUTUP

Dari uji hasil beda atas *discretionary accrual* dan *deferred tax* menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan *discretionary accrual* dan *deferred tax* sebelum dan sesudah perubahan UU PPh ditolak. Hal ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Dari hasil uji regresi linier berganda yang dilakukan serentak selama 4 tahun, menunjukkan bahwa secara parsial hanya satu variabel yaitu EPRESS yang berpengaruh signifikan terhadap *discretionary accrual*. Penelitian ini memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen laba secara bersama dapat menjelaskan variabel *deferred tax*. Dari beberapa variabel tersebut, secara parsial tiga variabel yaitu EPRESS, DEBT dan ROA yang berpengaruh signifikan terhadap *deferred tax*. Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) jumlah sampel dalam penelitian ini masih kecil; (2) Penelitian ini tidak memasukan industri jasa keuangan sehingga hasil didapat tidak dapat digeneralisir pada semua industri; (3) Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel pengukuran insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak (*tax planning*); (4) Pengukuran variabel *deferred tax* dalam penelitian ini menganggap seluruh *deferred tax* sebagai komponen diskresioner. Pada kenyataannya terdapat kemungkinan ada sebagian *deferred tax* yang merupakan akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Karenanya pengelompokan keseluruhan *deferred tax* sebagai komponen diskresioner akan menimbulkan bias dalam hasil penelitian; (5) Identifikasi faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi manajemen laba terbatas hanya pada faktor-faktor insentif dan non insentif pajak yang digu-

nakan dalam model manajemen laba. Dengan demikian tidak terlepas kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar yang digunakan dalam model ini yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat memperbaiki penelitian ini berdasarkan keterbatasan di atas, yaitu (1) perlu dilakukan penambahan sampel dan dapat dicoba untuk meneliti perusahaan di sektor usaha tertentu; (2) Penggunaan perencanaan pajak sebagai proksi insentif pajak dapat diperluas dengan menggunakan insentif pajak lainnya; (3) Penggunaan *deferred tax* dalam menjelaskan fenomena manajemen laba belum dilakukan di Indonesia sebelumnya, karenanya perlu dilakukan penyempurnaan model, misalnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *deferred tax* tadi sehingga dapat dikelompokkan sebagai komponen diskresioner dan non diskresioner; (4) Penelitian dilakukan terhadap sektor usaha tertentu (sebagai proksi motivasi *earnings management* yang tetap) dengan data *time series* untuk mengetahui apakah koefisien  $R^2$  meningkat dengan cara ini; (5) Penelitian selanjutnya perlu diidentifikasi lebih rinci mengenai faktor-faktor yang digunakan dalam menguji model terbaik sebagai pengukur manajemen laba. Penentuan faktor-faktor ini sebaiknya dikaitkan dengan tujuan (motivasi-motivasi) manajemen laba tertentu yang ingin diteliti dalam penelitian yang dilakukan tersebut (Scott, 2003). Sebagai contoh, untuk perusahaan yang dianggap melakukan manajemen laba untuk menghindari default, faktor-faktor yang digunakan adalah yang terkait dengan kondisi likuiditas perusahaan. Pada model *deferred tax* (DT), perlu dikaitkan dengan instrument *deferred tax* seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, biaya manfaat pension dan metode penilaian persediaan.

## REFERENSI :

- Arief, Sritua, 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-Press.
- Boynton, Charles E., Dobbins, Paul S. and George A.Plesko, 1992. Earnings Management and the Corporate Alternative Minimum Tax, *Journal of Accounting Research*, Vol. 30.
- Buckley, J.W.; M.H. Buckley dan Hung-Fu Chiang. 1976. *Research Methodology & Business Decisions*. National Association of Accountants, New York: 11-50
- Burgsahler, David C. dan Ilia D. Dichev. 1997. Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses. *Journal of Accounting and Economics*, vol 24, pp. 99-126.

- Dechow, P., Sloan, R. dan Sweeney, A. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, Vol. 70, No. 2: 193 – 225.
- Dechow, P. dan Skinner, Douglas J. 2000. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. *Accounting Horizons*; Jun 2000.
- Dechow, P., S. Richardson dan I. Tuna. 2003. Why Are Earnings Kinky? An Examination of the Earnings Management Explanation. *Review of Accounting Studies*, Vol. 8: 355 – 384.
- Faisal, 2003. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Hutang Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Syah Kuala*, Vol. 5, No. 2, Mei: 133-152.
- Frankel, Micah, and Robert Trezervant, 1994. The Year End LIFO Inventory purchasing Decision: An Empirical Test. *Accounting Review*, April: 382-398.
- Greene, William H. 2010. *Econometric Analysis*. Seventh Edition. New York: Pearson Education, Inc.
- Guenther, David A. 1994. Earnings Management in Response o Corporate Tax Rate Changes: Evidence from 1986 Tax Reform Act. *Accounting Review*. January: 230 –243.
- Gujarati, Damodor N. 2004. *Basic Econometrics*. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies.
- Gumanti, Tatang Ary, 2000, Earnings Management: Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, Nopember: 104 – 115.
- Gumanti, Tatang Ary. 2003. *Motivasi di Balik Earnings Management*. *Usahawan* No.12 Th. XXXII Desember: 21-26.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 10. Jakarta: Penerbit PT. Raja Garfindo.
- Healy, P. M., 1985. The Effect of Bonus Scheme on Accounting Decisions. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 7, No. 1-3: 85 – 107.
- Insukindro, 1998. Sindrum  $R^2$  dalam Analisis Regresi Linier Runtun Waktu. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Oktober, Vol. 13, No. 4: 1-11.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Diakses dari <http://papers.ssrn.com/abstract=94043>
- Jones, J., 1991. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*:193-228.
- Meutia, Inten, 2004. Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 7, NO.3, September: 333-350.
- McNichols, M.F., 2000. Research Design Issues in Earnings Management Studies. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 19: 313-345
- Phillips, J., M. Pincus dan S. O. Rego, 2003. Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense. *The Accounting Review*, Vol. 78. No. 2, April: 491-521.
- Purba, Marisi P., dan Andreas, 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan : Berdasarkan IAS No. 11 dan PSAK No. 46*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Scott, William R., 2003. *Financial Accounting Theory*. Third Edition. Toronto, Ontario. Pearson Education Canada Inc.
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im. 2000. Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Oktober: 424-441
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im. 2001. Bank Health Evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry. *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol. 3, No. 2, May: 159-176.
- Teoh, S.H., T. J. Wong dan G. Rao. 1998. Are Accruals during Initial Public Offerings Opportunistic ? *Review of Accounting Studies*, Vol. 3: 175-208.
- Undang-Undang Perpajakan Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman, 1986. *Positive Accounting Theory*. Newyork: Prentice Hall.
- Wulandari, Dewi, Kumalahadi dan Janur Eko Prasetyo, 2004. *Indikasi Manajemen Laba Menjelang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali : 883 – 896.
- Yin, Jennifer, and Agnes Cheng, 2004. Earnings Management of Profit Firms and Loss Firms in Response to Tax Rate Reductions. *Review of Accounting and Finance*, Vol. 3: 67 – 92.
- Yulianti, 2004. *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Mendeteksi Manajemen Laba*. Tesis. Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Yulianti. 2004. *Kemampuan Beban pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VII (Bali).
- Zhang, Huai. 2002. Detecting Earnings Management-Evidence from Rounding-up in Reported EPS. Working Paper. University of Illinois at Chicago.